

Perancangan Antarmuka Situs Web Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Kota Malang

Windya Zahrah K.^{*1)}, Muhammad Ainul Yaqin²⁾, dan Nugraha Tri Utama³⁾

^{1, 2)}Teknik Informatika, Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Jalan Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144, Indonesia

³⁾Aplikasi dan Telematika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Perkantoran
Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4,

Jalan Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Indonesia 65132

Email: 19650150@student.uin-malang.ac.id¹⁾, yaqinov@ti.uin-malang.ac.id²⁾

Abstrak

Metode user centered design merupakan pendekatan yang membuat user sebagai tokoh utama dalam perancangan sebuah sistemnya. Belum adanya sistem web pengaduan tindak pidana korupsi menjadi sebuah masalah yang dihadapi oleh user, karena saat ini pengaduan tindak pidana korupsi masih menggunakan sistem manual. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami mengusulkan metode user centered design dan survei terhadap user. Desain website sistem pengaduan telah melalui pengujian yang telah dilakukan user sebagai hasil akhir keberhasilan dalam aspek kemudahan dan kenyamanan user saat menggunakan website tersebut. Setelah dilakukan pengujian akhir didapatkan hasil pengujian yang menyatakan bahwa website yang di desain peneliti telah memenuhi kebutuhan pengguna yang telah di survei sebelumnya. Hal ini dibuktikan bahwa 95,5% user menyatakan desain telah memenuhi kebutuhan para user dan user bisa menggunakannya dengan mudah dan faham.

Kata kunci: *web, pengaduan, user centered design.*

1. Pendahuluan (Introduction)

Tindak pidana korupsi telah merajalela di negeri Indonesia ini telah menyebabkan kerugian dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan perekonomian masyarakat serta menghambat perkembangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Penjelasan Umum tentang Hukum di Komisi Pemberantas Korupsi (2002), tindakan ini tergolong menjadi kejahatan yang luar biasa. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

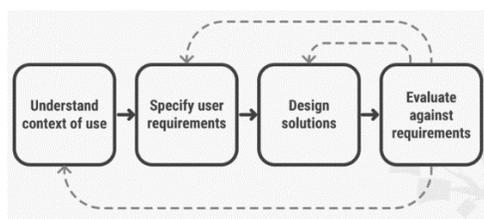
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan Whistleblowing System. Sistem pengaduan yang ada saat ini masih manual, berdasarkan persepsi masyarakat sekarang bahwa 100% setuju apabila system ini segera diadakan. Berdasarkan hasil survei kendala yang terjadi saat mengadu laporan yaitu tidak praktis dan apabila masih manual, pelapor terjadi kendala di waktu yang mana tidak bisa melapor secara on-time sehingga sangat diperlukan system ini supaya para pelapor bisa melaporkan pelanggaran secara on-time. Adapun Harapan

masyarakat yaitu dengan adanya system ini segera terbentuk dengan baik supaya proses pengaduan kedepannya bisa efisien dan bisa hemat waktu.

Berdasarkan hal tersebut perlu dibentuknya Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) supaya memudahkan pelapor untuk melaporkan pengaduannya, selain itu system ini juga akan memudahkan pihak inspektorat yang bertugas untuk menanggapi pengaduan. Pemodelan aplikasi dirancang dengan menggunakan tahapan metode UCD (User Centered Design) supaya website bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan user.

2. Metode Penelitian (Methods)

Metode yang digunakan dalam perancangan whistleblowing system ini yaitu metode User Centered Design (UCD), dimana metode ini berfokus kepada kebutuhan user. Terdapat beberapa tahap dalam menggunakan metode User Centered Design ini, yaitu Understand context of use, specify user requirements, design solutions, dan evaluate against requirements. Sebagaimana dijelaskan dibawah ini:



Gambar 1. Tahapan metode UCD

1. Understand context of use

Pada tahap ini peneliti akan memahami konteks dari pengguna sistem ini yaitu terdapat pada peraturan walikota Malang nomor 76 tahun 2015 pasal 4 nomor 3 yaitu ditanggung jawabkan oleh Sekretaris Daerah, diketuai oleh Inspektur, dan beranggotakan Asisten Administrasi Pemerintahan, Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Hukum, Inspektur Pembantu, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan dengan tujuan metode yang digunakan yaitu berfokus kepada kebutuhan user, maka peneliti membuat kuisioner untuk meneliti kebutuhan para user tersebut. Dari hasil kuisioner tersebut peneliti mendapatkan yaitu sebanyak 90.9% hanya membutuhkan versi websitenya. Dari kuisioner tersebut juga didapatkan keadaan sekarang ketika pelaporan masih digunakan secara manual sebagian besar berpendapat apabila kurang efektif dan kurang aman dalam pelaporannya karena masih manual.

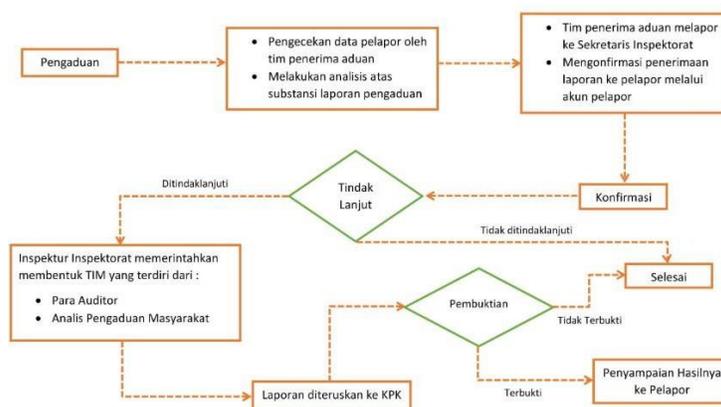
2. Specify user requirements

Dalam sistem ini terdapat berbagai macam user yaitu berdasarkan pada peraturan Walikota Malang nomor 76 tahun 2015 pasal 4 nomor 3 yaitu ditanggung jawabkan oleh Sekretaris Daerah, diketuai oleh Inspektur, dan beranggotakan Asisten Administrasi Pemerintahan, Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Hukum, Inspektur Pembantu, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Dan terdapat pada Pasal 5 yang berisikan bahwa Tim Penerima Pengaduan memiliki kewajiban yaitu :

a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;

- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Dalam hal tersebut yang dijelaskan kewajiban Tim Penerima Pengaduan tersebut maka dibuat alur proses penanganan system pengaduan ini sebagai berikut pada gambar 2.



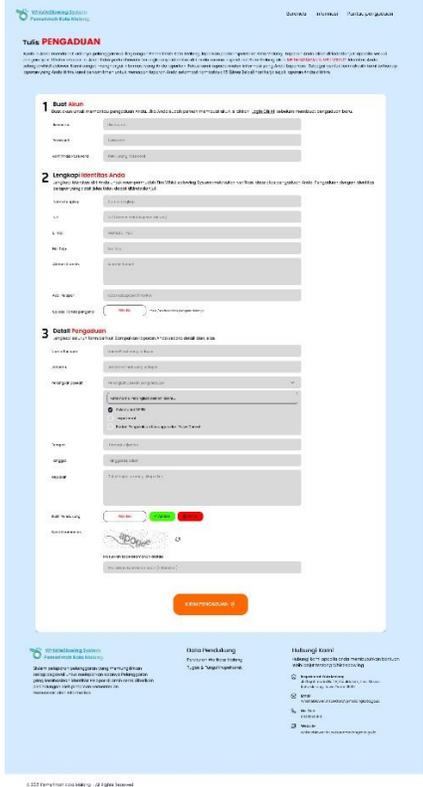
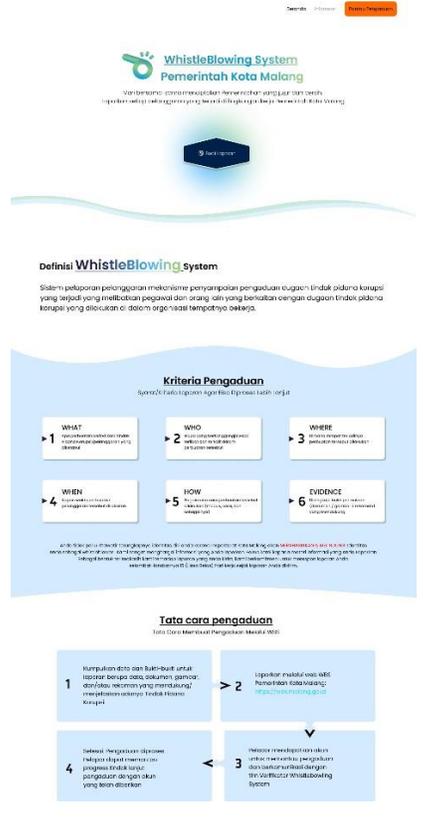
Gambar 2. Alur Proses Whistleblowing System

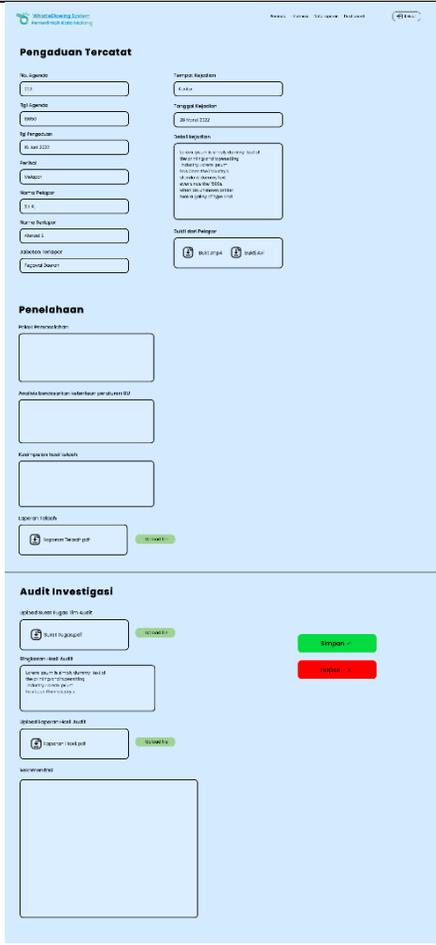
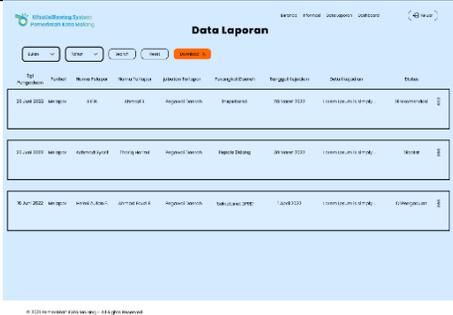
3. Design Solution

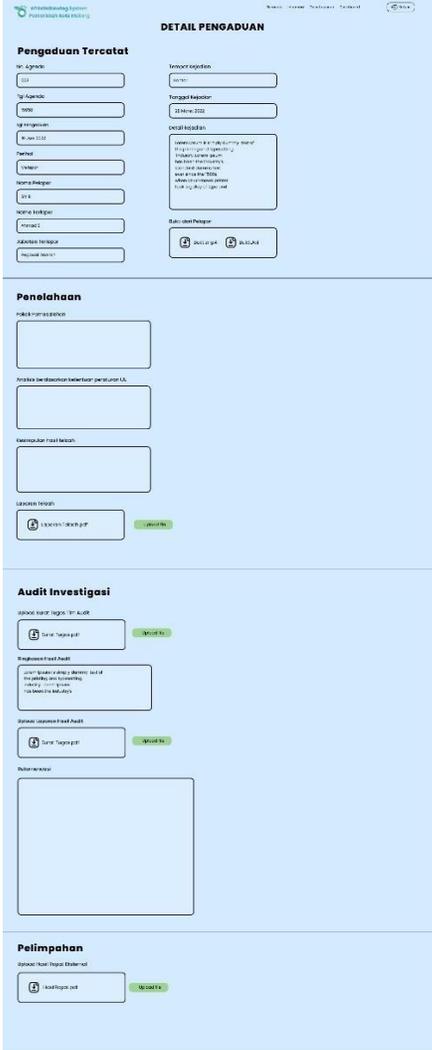
Memasuki tahapan selanjutnya yaitu solusi design sistem pengaduan yang akan dibuat. Menimbang dengan hasil kuisioner bahwa 100% setuju dengan diadakannya website whistleblowing system ini, maka akan dibuatkan solusi desainnya.

Tabel 1. Solusi Desain

No.	Pengguna	Kebutuhan	Desain	Deskripsi Desain
-----	----------	-----------	--------	------------------

<p>1</p>	<p>User/Pelapor</p>	<p>Bisa membuat laporan pengaduan dengan mengisi form secara lengkap</p>		<p>Dengan dibuatkannya solusi desain seperti gambar disamping, maka pengguna bisa membuat laporan pengaduan dengan membuat akun terlebih dahulu, dilanjutkan dengan melengkapi identitas, dan mendetailkan pengaduan serta mengupload bukti yang dimiliki oleh pelapor, dengan langkah itu maka pelaporan bisa terproses kepada tim penerima pengaduan.</p>
		<p>Bisa melihat informasi tata cara pengaduan</p>		<p>Pada halaman utama sistem ini disediakan berbagai macam informasi yaitu definisi dari sistem pengaduan ini, kemudian terdapat kriteria pengaduan dan tata cara pengaduan yang bisa pelapor siapkan sebelum membuat laporan pengaduan.</p>

		<p>Melakukan audit investigatif</p>		<p>Tim penerimaan pengaduan bisa mengupload hasil audit investigasi supaya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya dan menyimpannya.</p>
		<p>Membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.</p>		<p>Data laporan bisa diakses tim yang bertugas pada tab navigator data laporan dan dapat download dengan filter bulan atau tahun.</p>

		Rekap detail pengaduan		Dapat Melihat detail pengaduan dari awal hingga akhir proses penanganan pengaduan
--	--	------------------------	---	---

4. Evaluate against requirements

Pada tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi terhadap kebutuhan dengan mencocokkan kebutuhan tersebut dengan desain solusi yang sudah dibuat oleh peneliti. Sebagaimana dibuatnya table dibawah ini. Evaluasi berbentuk kuisiner yang disebar pada 22 responden dimana 22 responden ini sebagai 2 orang sebagai operator, dan 20 sebagai pengguna. Hasilnya ditunjukkan pada table 3

Tabel 3. Hasil Kuisiner

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sistem ini mudah digunakan?	100% dari 22 responden menjawab “Ya”
2	Apakah sistem ini efisien dalam merekam laporan?	95,5% dari 22 responden menjawab “Ya”

3	Apakah dengan desain solusi yang dibuat semua masalah user terselesaikan?	100% dari 22 responden menjawab “Ya”
4	Dalam hal desain, apakah tata letak, ukuran, dan warna sudah cukup?	95,5% dari 22 responden menjawab “Ya”
5	Apakah alur penggunaan web ini mudah difahami?	95,5% dari 22 responden menjawab “Ya”
6	Apakah informasi yang diberikan pada web mudah dimengerti?	95,5% dari 22 responden menjawab “Ya”

3. Hasil dan Pembahasan (Results and Discussions) tingkat keujian

Dari hasil kuisisioner yang peneliti dapat, setiap pelapor (whistleblower) yang akan membuat laporan masih terkendala tidak efisien dikarenakan sistem pengaduan masih manual, laporan yang sudah diajukan juga kurang efisien karena sistemnya manual yang mana masih menggunakan kertas yang bisa hilang atau robek. Masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengatasi keluhan dari user supaya bisa melaporkan pengaduan tindak pidana korupsi dengan aman, nyaman, dan cukup efisien. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirancang desain website sistem pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblowing system).

3.1 Desain Output

Output sistem web pengaduan whistleblowing system, berdasarkan metode yang digunakan yaitu :

- Halaman utama menampilkan tombol untuk membuat pengaduan. Tombol yang ditampilkan menjadi center saat ditampilkan supaya user lebih mudah memahami alur awalnya.
- Halaman yang menginformasikan tata cara pengaduan. Informasi yang ditampilkan berbentuk alur deskriptif tata cara pengaduan supaya pengguna lebih menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat melaporkan pengaduan.
- Halaman yang menampilkan form pengaduan. Pelaporan yang ditampilkan berbentuk form kemudian pengguna inputkan supaya pelaporan bisa sampai kepada pihak tim penerima pengaduan.
- Halaman yang menampilkan status proses pengaduan. Informasi yang ditampilkan berbentuk tabel yang disediakan menampilkan status pengaduan sampai di proses mana.

3.2 Desain Input

Informasi proses pengaduan serta hasil pelaporan pengaduan oleh website ini membutuhkan data yang dimasukkan dari website yang dijalankan oleh admin tim penerima pengaduan. Tugas admin pada website ini adalah menginputkan hasil pelaporan pengaduan serta memberikan update progress laporan di proses.

Berdasarkan output web whistleblowing system sebagaimana diuraikan diatas, maka input dari web ini yaitu :

- Pengaduan diterima dalam bentuk tabel yang menyediakan hasil pengaduan whistleblower dalam setiap step yang dijalankan.
- Informasi hasil akhir proses pengaduan atau data laporan diinputkan ke website server untuk bisadi download.
- Informasi detail laporan berbentuk narasi deskriptif proses dari awal hingga akhir.

Website sistem pengaduan whistleblowing system ini telah diuji pengguna dalam bentuk prototype dan diutarakan komentarnya dalam bentuk kuisioner. Pengujian penerimaan oleh user menyatakan bahwa 4 pertanyaan dan 22 responden terdapat 95,5% - 100% presentase jawaban. Selain pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuisioner, terdapat kolom saran yang tersedia untuk pengguna isi, seperti halnya berikut :

- a. Masih ada beberapa yang kurang seperti ada warna yang membuat font kurang enak untuk membacanya, kemudian untuk bagian statistik mungkin bisa dibuat lebih menarik lagi
- b. Dalam pelaporan terkadang butuh salinan cetak berupa pdf atau lainnya, mohon disertakan supaya bisa didownload

Saran tersebut peneliti tindak lanjuti dengan beberapa penambahan, yaitu:

- a. Memberikan warna yang cerah dan font yang gelap dalam design yang dibuat, sehingga font lebih enak dibaca, kemudian dalam bagian statistik peneliti melakukan pembenahan dengan membuat diagram statisik pengaduan laporan whistleblowing system, sehingga pengguna dapat melihat secara jelas berapa presentase pelaporan yang diproses atau yang ditolak.
- b. Menambahkan filter bulan dan tahun serta fitur download yang berekstensi pdf.

4. Kesimpulan (Conclusion)

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Website whistleblowing system ini telah berhasil memenuhi standar kebutuhan pengguna yang sesuai dengan metode yang digunakan
- b. Website whistleblowing system yang telah di desain sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat dikembangkan serta dapat berperan sebagai sistem pengaduan pelaporan yang efisien
- c. Website whistleblowing system telah berhasil melewati pengujian prototype dan pengujian penerimaan pengguna.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Pada penyusunan penelitian ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari pihak yang terlibat, maka dari itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing peneliti dan dosen pembimbing instansi pkl yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam berlangsungnya penelitian.

Daftar Pustaka

Aprindawati, A, Isabella, Febriyanti, D., 2017. Kualitas Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol2 No1 ISSN 2502-2032

Carozza, D. (2015, Nov 23). Whistleblowers we're thankful for: Many thanks for sentinels who expose fraud. Retrieved from Fraud Magazine: <https://www.fraudmagazine.com/article.aspx?id=429499089> 1

Chammas, A., Quaresma, M., & Mont'Alvão, C. (2015). A Closer Look on the User Centred Design. *Procedia Manufacturing*, 3(Ahfe), 5397–5404. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.656>

Chen, P., Chen, T. & Yuan, H., 2010. GIS based crime risk analysis and management in cities. In 2nd International Conference on Information Science and Engineering, ICISE2010 - Proceedings. pp. 3721–3724.

Dade.B, Atikah., 2015. Sistem Informasi Dashboard Kependudukan di Kelurahan Manis Jaya Kota Tangerang, Jurnal SISFOTEK GLOBAL Vol5 No1 ISSN 2088-1762

Firman Alandari. (2013). Peran Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau1, 1, Nomor 1

Fu, P., & Fitzgerald, M. (2013). A Comparative Analysis on the Effect of the Chosen ILSes on Systems and Technical Services Staffing Models. *Information Technology and Libraries*, 32(3), 47. <https://doi.org/10.6017/ital.v32i3.3388>

Foster, N. F. (Ed. . (2014). *Participatory Design in Academic Libraries*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/260514686_Organizing_the_Library_for_User-Centered_Design/download

Herdrianto. D.E, 2014. Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo Kabupaten Pacitan, Jurnal IJNS Vol3 No4 ISSN 2302-5700

Hidayatullah, Mulyadi., 2015. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web, Jurnal IT CIDA Vol1 No1 ISSN 2477-8133

Isa, I.G.T, dan Hartawan, G.P., 2017 Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia), Vol.5. ISSN: 2088-6969 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kemendagri.

Lacayo, R., & Ripley, A. (2002, Dec 30). *Persons of the year 2002: The whistleblower*. Retrieved from Time: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003998,00.html>

Mishra, L., & Mishra, J. (2014). ICT resources and services in university libraries. *International Journal of Digital Library Services*, 4(3), 243–250. Retrieved from <http://www.ijodls.in/uploads/3/6/0/3/3603729/22.pdf>

Novianty, C. (2017). Review Konsep Responsive Design Dengan Framework Materialize Pada Website. *Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan*, Vol. 2, No. 1, September 2017, e-ISSN: 2540-7600, p-ISSN: 2540-7597, 2(1), 41–44.

Prasetyo. E, 2018 Media Informasi Prosedur Penerbitan Data Kependudukan Berbasis Multimedia Pada Dina Kependudukan dan Catatan Sipil, Jurnal TIPS Vol. 8, No. 01, ISSN: 1411-3201.

P.Niemien, M. (2015). User-Centered Design Competencies. Doctoral Dissertations - Aalto University.

R. Ramdani, M. Lestari, and N. W. Parwati, "Sistem Informasi Permintaan dan Pengadaan Barang untuk Instalasi VSAT di PT Telkomsat," *J. Ris. dan Apl. Mhs. Inform.*, vol. 1, no. 01, pp. 126– 133, 2020, doi: 10.30998/jrami.v1i01.265.

Sari Icha. S, 2016 Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, *eJurnal Administrasi Negara* Vol. 4, No. 02, ISSN: 0000-0000.

Shiddiq, S. dan Pradnya, W.N., 2013 Sistem Informasi Akademik dan Administrasi SDIT AR- RAIHAN Bantul, *Jurnal Ilmiah DASI* Vol. 14, No. 04, ISSN:1411-3201.

Halaman ini sengaja dikosongkan